

DAKWAH SIYASAH (STRATEGI DAKWAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PERJUANGAN ASPIRASI UMAT ISLAM

Iyatna Supriatna
Muliaty Amin
Usman Jasad

Abstrak: Tulisan ini akan mengurai tentang bagaimana dakwah *siyasaah* sebagai strategi dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memperjuangkan aspirasi Islam di Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kota Kendari Sulawesi Tenggara yaitu strategi dakwah PKS di kota Kendari, Kab.Muna dan Anggota legislatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dakwah, komunikasi dan pendekatan sosiologis. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus inti Partai Keadilan Sejahtera di Kota Kendari yakni ketua umum dan sekretaris umum, dan ketua bidang dakwah DPW Sulawesi Tenggara, sekretaris DPD PKS Kab.Muna dan anggota legislatif, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta dokumentasi mengenai pelatihan yang pernah diikuti oleh para kader. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen masing-masing sesuai metodenya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan dakwah *siyasaah* sebagai strategi dakwah yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sulawesi Tenggara yakni dengan memadukan antara pola struktural dan kultural. Secara struktural PKS memperjuangkan regulasi atau kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam sedangkan secara kultural PKS melakukan pemberdayaan umat Islam melalui kelompok-kelompok tarbiyah yang intensif dan persuasif.

Keywords: *Dakwah Siyasaah, Partai Keadilan Sejahtera, Strategi Dakwah*

I. PENDAHULUAN

Dakwah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan Islam. Ajaran Islam yang dianut oleh umat manusia di berbagai belahan dunia merupakan bukti paling konkrit dari aktivitas dakwah yang telah dilakukan selama ini. Signifikansi dakwah ini akan terus berlangsung sampai akhir zaman, sebab dakwah merupakan usaha sosialisasi dan internalisasi ajaran Islam kedalam berbagai aspek kehidupan umat manusia. Dakwah selalu hadir memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi oleh umat manusia, jika dilakukan dengan cara yang tepat dan benar.

Dalam perspektif Islam, segala usaha yang dilakukan untuk membela dan menyebarkan ajaran Islam dapat dikategorikan sebagai aktivitas dakwah. Dakwah Islam adalah mengajak umat manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah secara menyeluruh yang dilakukan baik dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan sebagai

ikhtiar muslim dalam mewujudkan ajaran Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan *syahsiyah* (pribadi), *usrah* (keluarga), *jamaah* (kelompok), dan *ummat* (masyarakat).¹

Sebagai suatu kegiatan, dakwah menduduki tempat dan posisi yang sangat menentukan dalam menjaga eksistensi Islam. Keindahan dan relevansi Islam dengan perkembangan zaman sangat ditentukan oleh kegiatan dakwah.²

Esensi dakwah adalah menyeru dan mengajak manusia ke jalan Allah (Islam) dan agar menjadikan Islam sebagai landasan dalam segala aktivitas hidup dan kehidupan orang yang diserunya. Kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendukung efektivitasnya.

Salah satu cara yang cukup efektif yaitu dengan dakwah siyasah atau dakwah politik. Secara sederhana dakwah *siyasah* merupakan salah satu jenis dakwah yang melembaga dengan membawa misi Islam. Dakwah *siyasah* atau politik merupakan kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai salah satu alat untuk memperjuangkan Islam. Gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan.

Aktivis dakwah (*dai*) bergerak mendakwahkan ajaran Islam supaya Islam dapat dijadikan ideologi negara, atau paling tidak setiap kebijakan pemerintah atau negara selalu diwarnai dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga ajaran Islam melandasi kehidupan politik bangsa. Negara dipandang sebagai alat dakwah yang paling strategis. Dakwah politik disebut pula dakwah struktural. Kekuatan dakwah struktural ini pada umumnya terletak pada doktrinasi yang dipropagandakannya. Beberapa kelompok gerakan Islam gigih memperjuangkan dakwah *siyasah* ini, namun dengan cara atau strategi yang berbeda-beda, salah satu penyebabnya dikarenakan berbeda pemahaman pula dalam menafsirkan ayat-ayat yang terkait tentang dakwah.

Pilar utama dalam sistem demokrasi yakni partai politik, dalam hal ini hampir seluruh otoritas dalam negara melalui jalur politik. Oleh karena itu, untuk memperbesar akses *harakah* ke dalam negara itu jalannya hanya satu, yaitu memperbesar kendaraannya atau kanalnya yaitu partai politik. Apabila kanalnya besar, arus yang akan masuk ke negara juga semakin besar. Jadi, bila mau masuk ke negara, harus membuat kanal besar bagi dakwah. Salah satu kekuatan sosial politik yang menerapkan hal ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS berdiri sejak tahun 1999 yang mulai memunculkan eksistensinya sebagai kekuatan politik baru dengan nama Partai Keadilan, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, dimana sebelumnya dikenal oleh masyarakat sebagai organisasi tanpa bentuk. Tidak lama setelah rezim orde baru tumbang, sepanjang perkembangan Partai Keadilan (PK) dan PKS, kader-kader partai berusaha menempatkan dakwah dan politik sebagai elemen yang tidak terpisahkan.³

Tulisan ini akan mengurai tentang bagaimana dakwah *siyasah* sebagai strategi dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memperjuangkan aspirasi Islam di Sulawesi Tenggara?

¹Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), h.16.

²Didin hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.64.

³La Ode Muh. Dasnah (42 tahun), Ketua Bidang Dakwah dan Staf Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Observasi dan Wawancara*, 25 Juni 2015.

II. DAKWAH SIYASAH SEBAGAI STRATEGI DAKWAH

1. Makna Siyasah

Secara sederhana, kata *siyasah* dimaknai sebagai politik. Pada dasarnya tidak ada dijumpai penggunaan kata *siyasah* dalam al-Quran maupun hadis yang maknanya politik, namun ada banyak konteks yang menunjukkan ketepatan pemaknaan tersebut.

Dalam terminologi Arab, secara umum dipahami bahwa kata *siyasah* berasal dari kata *as-saus* yang berarti *ar-ri'asah* (kepengurusan). Jika dikatakan *sasa al-amra* berarti *qama bihi* (menangani urusan). Syarat bahwa seseorang berpolitik dalam konteks ini adalah dia melakukan sesuatu yang membawa *mashlahat* bagi jamaah atau sekumpulan orang.⁴

Sedangkan secara istilah banyak defenisi para tokoh tentang siyasah atau politik, yang penulis identifikasi sebagai dakwah *siyasah* antara lain:

Bernard Lewis mengemukakan bahwa Islam adalah sebuah ajaran sempurna dan komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Termasuk didalamnya adalah politik, yang tidak mengenal pemisahan antara aturan agama dan aturan Negara.⁵

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Natsir menyebutkan bahwa Islam sebagai ideologi secara prinsip merupakan perangkat ajaran, gagasan, yang didalamnya adalah kumpulan nilai dari suatu sistem berkaitan dengan masalah keduniaan yang disusun dalam aturan sebagai pedoman kenegaraan dan politik. Dimana arah dan tujuan ideologi tersebut adalah bentuk perjuangan, prinsip sistem yang akan dikembangkan (sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, pendidikan dan sebagainya) yang berpijak pada sumber otoritatif, yaitu al-Quran dan sunnah sebagai petunjuk setiap muslim.⁶

Dakwah Islam merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia untuk melakukan proses rekayasa sosial melalui usaha mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial dan norma ajaran.

Rasullullah saw. membentuk masyarakat Islam dalam kesatuan politik dan memberikan contoh konkrit tentang kepemimpinan negara dan keimanan kaum muslimin di seluruh dunia. Maka dalam rangka meneladani Rasullullah saw dan mengikuti sunnahnya, seluruh kaum muslimin dituntut membentuk dirinya dalam satu kesatuan politik dan menegakkan satu *daulah* yang dipimpin oleh seorang yang berfungsi sebagai pengganti Rasullullah saw dalam menegakkan *din* dan mengarahkan politik kenegaraan yang murni Islami.⁷

Islam adalah aqidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan material, peradaban dan perundang-undangan. Sesungguhnya seorang muslim dengan hukum Islamnya dituntut untuk memperhatikan semua persoalan umat. Setelah batasan global dari makna Islam yang *syamil* dan subtansi makna politik yang tidak terkait dengan kepartaian. Hasan al-Banna melanjutkan seorang muslim tidak akan sempurna Islamnya kecuali jika ia seorang politisi,

⁴Cahyadi Takariawan, *Menyongsong Mihwar Daulah*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2009), h. 82.

⁵ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat; Islam, Budaya, Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 13.

⁶H.R. Gibb dalam M. Natsir, *Capita Selecta, Jilid I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 9.

⁷Sa'id Hawa, *Al-Islam 2; Penerjemah, Fakhrudin Nur Syam, Muhil Dhofir*, (Jakarta: Al I'tishom, 2002), h. 70.

mempunyai jangkauan pandangan jauh, dan mempunyai kepedulian besar terhadap umatnya.⁸

Politik dapat diperankan sebagai bagian dari proses dakwah, jika sewaktu-waktu perubahan masyarakat memerlukan pendekatan kekuasaan. Politik juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, yang proses internalisasinya dapat disosialisasikan secara kultural melalui kegiatan dakwah. Di sinilah dakwah sebagai suatu proses yang dinamis, atau suatu kekuatan yang hidup dalam mobilitas sosial tertentu, dan yang pada gilirannya merupakan daya pendorong terbentuknya sistem sosial dimana dakwah itu dilaksanakan.⁹

Sedangkan menurut Taqiyudin An-Nabani menjelaskan bahwa Islam sebagai ideologi (*mabda*) adalah sekumpulan *nizam* (peraturan) yang digali dari *fikrah* (pemikiran/ide) dan *tariqah* (metode yang tak terpisahkan dari fikrah) dengan asas atau tolok ukurnya adalah akidah. Karena itu lahirnya peraturan dari akidah islam menjadi tolok ukur bagi perbuatan manusia di dalam kehidupan untuk memecahkan perkara serta *mafahim* (pemahaman) yang benar dan produktif tentang kehidupan.¹⁰

Pandangan Nurcholis Madjid sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya spiritual dan pribadi. Negara dan agama memang tidak dapat dipisahkan melalui individu-individu warga negara terdapat pertalian tidak terpisahkan antara motivasi atau sikap bathin bernegara dan kegiatan atau sikap lahir bernegara.¹¹

Usaha Rasulullah saw. dalam menghadapi *jahiliah-isme* dan menegakkan masyarakat Islam serta membangun kehidupan islami merupakan dalil syar'i mengenai kewajiban *jama'i* (secara kolektif) dalam memperjuangkan Islam. Rasulullah saw. tidak pernah mengandalkan metode perjuangan individual, akan tetapi sejak hari pertama beliau intensif membangun sebuah "komunitas" yang unsur-unsur dan individu-individunya telah dipilih dan disaring sedemikian rupa agar menjadi sarana bagi Islam dalam gerakan perubahan.¹²

Daulah Islamiyah sebagaimana yang digambarkan oleh Hasan al-Banna adalah *daulah* yang memimpin negara-negara Islam dan menghimpun ragam kaum muslimin, mengembalikan keagungannya, serta mengembalikan wilayah yang telah hilang dan tanah air yang telah dirampas. Lebih lanjut Hasan al-Banna mengungkapkan kewajiban-kewajiban *daulah* Islam diantaranya:

- a. Mengamalkan hukum-hukum Islam, dan itu merupakan kewajiban.
- b. Melaksanakan sistem sosial Islam secara lengkap.
- c. Memproklamirkan prinsip-prinsip yang tegas ini, jangan sampai ia dibiarkan tampak tidak jelas.

⁸Hasan Al Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*, (Surakarta: Era Intermedia, 2011), h. 67.

⁹Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 119.

¹⁰Taqiyudin al-Nabani, *An-Nizam al-Islam (Peraturan Hidup dalam Islam)*, (Jakarta: HTI Press, 2007), h. 56.

¹¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Ed. II, Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h. 146.

¹²Fathi Yakan, *Komitmen Muslim Sejati*, (Cet.IX; Solo: Era Intermedia, 2010), h. 107.

d. Menyampaikan dakwah Islam dengan arif dan bijaksana kepada semua orang, jangan sampai di dunia ini ada orang yang belum tersentuh oleh dakwah Islam yang disertai dengan argumentasi yang jelas.¹³

Pemikir dakwah Ali Aziz menyatakan agar perbedaan yang seringkali terlihat antara satu aktivitas dakwah dan aktivitas dakwah yang lain tidak pada tujuan maupun misi yang disampaikan, tetapi lebih pada paradigma, strategi dan kemasan dakwah.¹⁴

Terkait dengan penelitian ini, maka penulis mencoba menghubungkannya dengan komunikasi vertikal dan horizontal.

Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah (*downward communication*) dan dari bawah ke atas (*upward communication*), adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik (*two way traffic communication*). Adapun komunikasi horizontal ialah komunikasi secara mendatar, antara anggota staf dengan anggota staf, karyawan sesama karyawan, dan sebagainya.¹⁵

Berdasarkan beberapa pandangan para tokoh di atas tentang *siyasah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdakwah melalui politik atau dakwah *siyasah* merupakan salah satu strategi dakwah.

Di antara makna *siyasah* yang penting adalah:

1) Seni mengatur pemerintahan

Politik tidak identik dengan pemerintahan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu bagian penting politik adalah pemerintahan. Rifa'ah Ath-Thahtawi mendefinisikan politik sebagai seni mengatur pemerintahan dan berbagai hal yang terkait dengannya. Rifa'ah al-Thahtawi menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Cahyadi Takariawan:

Kajian tentang ilmu ini, perbincangannya, diskusi tentangnya di berbagai forum dan tempat pertemuan, menyelami arusnya, semua itu dinamakan politik. Aktivis dibidang ini disebut politikus. Maka politik berarti segala sesuatu yang bersentuhan dengan pemerintahan, hukum-hukum serta berbagai hal yang berkaitan dengannya.

2) Seni mengelola perubahan

Politik juga bisa dimaknai dengan seni mengelola perubahan. Politik berarti bahwa kita menciptakan perubahan untuk mereka dan kita menjadikan mereka bisa melakukan perubahan tersebut untuk diri mereka sendiri.

3) Upaya merealisasikan kebaikan

Dalam perspektif Aristoteles dan para filosof Yunani pada umumnya, politik dimaknai sebagai segala sesuatu yang sifatnya dapat merealisasikan kebaikan di tengah masyarakat.¹⁶

4) Kepedulian terhadap urusan umat

Politik bisa dimaknai secara lebih luas sebagai kepedulian terhadap berbagai dinamika dan persoalan umat. Hasan al-Banna menyebutkan politik adalah "hal memikirkan persoalan-persoalan internal dan eksternal umat." Yang dimaksud dengan internal adalah mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa

¹³Sa'id Hawa, *Membina Angkatan Mujahid, Studi Analitis atas Konsep Dakwah Hasan Al Banna dalam Risalah Ta'alim*, (Cet.VII; Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010), h.65-66.

¹⁴Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 17.

¹⁵Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, h. 123-124.

¹⁶Cahyadi Takariawan, *Mcnyongsong Mihwar Daulah*, h. 84.

untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritisi jika mereka melakukan kekeliruan.¹⁷

Sedangkan sisi eksternal politik dalam wacana al-Banna adalah “memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, menghantarkannya mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya.” Karena persepsi semacam inilah al-Banna dengan tegas mengatakan, “sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politikus, mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa.”¹⁸

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dipahami bahwa cakupan aktivitas politik itu luas. Sejak dari aktivitas individual yang memproses perubahan, sampai aktivitas kolektif dalam partai politik atau dalam urusan pemerintahan. Keseluruhannya masuk dalam wilayah pengertian politik. Dengan pengertian seperti ini, tampak bahwa *siyasaah* termasuk salah satu tugas kerasulan yang penting. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hadid/57:25 yaitu:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya mereka manusia dapat melaksanakan keadilan....¹⁹

2. Politik dalam Islam

Ketika berbicara di wilayah hubungan antara politik dengan agama, sering ada diskursus publik yang tidak konstruktif. Syekh Hasan al-Banna mengungkapkan:

Sedikit sekali orang berbicara tentang politik dan Islam, kecuali ia memisahkan antara keduanya. Masing-masing diletakkan secara independen. Menurut mereka, keduanya tidak mungkin bersatu dan dipertemukan. Untuk itulah organisasi mereka disebut organisasi Islam nonpolitik. Pertemuan mereka adalah pertemuan keagamaan yang tidak mengandung unsur politik, dan hal ini bisa dilihat dari ungkapan pada Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga mereka tidak mencampuri urusan politik.²⁰

Untuk itu, ketika memberikan batasan pemahaman Islam, Syekh Hasan al-Banna memberikan sebuah gambaran yang utuh tentang universalitas dan integralitas Islam. Beliau mengungkapkan Islam adalah sebuah sistem universal yang lengkap dan mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan. Islam adalah Negara dan tanah air, pemerintahan dan rakyat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan

¹⁷Hasan Al Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*, h. 68

¹⁸Hasan Al Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*, h. 68-72.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 542.

²⁰Hasan Al Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al Banna*, (Cet.I; Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 250.

kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan pemikiran, sebagaimana Islam adalah aqidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih.²¹

Berdasarkan penggambaran tersebut tampak sebuah defenisi Islam yang teramat luas, mencakup segala aspek kehidupan kemanusiaan dan tidak ada yang ditinggalkan. Politik merupakan salah satu bagian utuh dari perhatian Islam, agar manusia bisa melaksanakan fungsi kekhilafahan di muka bumi dengan baik, memakmurkan alam semesta dan memimpin umat manusia menuju kebaikan hidup di dunia maupun akhirat.

Selanjutnya Syekh Hasan al-Banna menegaskan setelah batasan global dari makna Islam yang *syamil* dan subtansi makna politik yang luas dan tidak terikat dengan kepertaian ini, saya bisa mengatakan secara terus terang bahwa seorang muslim tidak akan sempurna Islamnya kecuali jika dia seorang politisi, mempunyai jangkauan pandangan yang jauh, dan mempunyai kepedulian yang besar terhadap umatnya. Saya juga bisa katakan bahwa pembatasan dan pembuangan makna ini (yakni pembuangan makna politik dari subtansi Islam) sama sekali tidak pernah digariskan oleh Islam. Sesungguhnya setiap *jam'iyah* Islamiyah harus menegaskan pada garis-garis besar programnya tentang perhatian dan kepedulian *jam'iyah* tadi terhadap persoalan-persoalan politik umatnya. Kalau tidak seperti itu, *jam'iyah* tadi butuh untuk kembali memahami makna Islam yang benar.²²

Para ulama terdahulu telah memberikan penjelasan dan pembahasan yang memadai mengenai aspek politik. Ibn al-Qayyim al Jauzi dalam kitabnya *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah* mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Cahyadi Takariawan:

Allah swt. mengutus para rasul untuk menyampaikan kitab-kitab suci-Nya, agar manusia melaksanakan keadilan yang ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip langit dan bumi. Jika keadilan muncul dan terlihat dalam bentuk apapun maka itulah syariat Allah dan agama-Nya. Bahkan Allah swt. telah menjelaskan bahwa garis-garis yang telah ditetapkan itu dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dikalangan hamba-hamba-Nya dan agar manusia berbuat adil di muka bumi. Cara apapun yang ditempuh jika sesuai dengan garis-garis yang telah dijelaskan untuk mewujudkan keadilan adalah bagian dari agama dan tidak bertentangan dengannya. Jadi, tidak dapat dikatakan bahwa politik yang berkeadilan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh syariat, melainkan ia sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat dan bahkan bagian integral daripadanya.²³

Hijrah dalam sejarah dakwah Rasullullah saw adalah sebuah metamorfosis dari “gerakan” menjadi Negara. 13 tahun sebelumnya, Rasullullah saw melakukan penetrasi sosial yang sangat sistematis, dimana Islam menjadi jalan hidup individu, dimana Islam “memanusia” dan kemudian manusia “memasyarakat”. Sekarang melalui hijrah, masyarakat itu bergerak linear menuju Negara. Melalui hijrah gerakan itu “menegara” dan Madinah adalah wilayahnya. Kalau individu membutuhkan aqidah, maka Negara membutuhkan perangkat sistem, begitulah setelah komunitas muslim menegara, dan mereka memilih Madinah sebagai wilayahnya, Allah swt. menurunkan perangkat sistem yang mereka butuhkan, maka turunlah ayat-ayat hukum dan berbagai kode etik sosial, ekonomi, politik dan keamanan lainnya. Lengkaplah sudah susunan kandungan sebuah Negara: manusia, tanah dan sistem.²⁴

²¹Hasan Al Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al Banna*, h. 253.

²²Hasan Al Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al Banna*, h.254.

²³Cahyadi Takariawan, *Mcnyongsong Mihwar Daulah*, h. 81.

²⁴Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2010), h.3.

Salah satu faktor *najahud da'wah* (faktor sukses dakwah) adalah kerja yang berkesinambungan dan misi utama dakwah adalah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah mengubah kehidupan umat manusia sehingga sejalan dengan tuntutan Islam, baik pada tingkatan individu maupun tingkatan kolektif. Sehingga kemudian terwujud sebuah tatanan kehidupan yang baik dimana *dien* Islam menjadi pedoman hidup.

Dalam manajemen aktivitas dakwah, seluruh putaran prosesnya akan senantiasa melalui tiga aktivitas utama, yaitu: konsolidasi, edukasi dan ekspansi. Inilah siklus kerja dakwah yang berjalan secara terus menerus. Konsep ini dalam rencana strategi kerjanya kemudian dibuat menjadi lima tahapan penting, yaitu:

- a. Konsolidasi adalah proses yang harus dilakukan secara cepat dan tepat. Karena setelah itu menunggu proses kerja yang sangat penting, yaitu pembinaan dan pelayanan.
- b. Pembinaan dan pelayanan, yaitu proses terus-menerus untuk memperluas rekrutmen kader di berbagai lapisan, meningkatkan kualitas kader, pengokohan kepribadian kepemimpinan kader, pengokohan eksistensi dan peran kader/*wajihah* yang bergerak di berbagai sektor dan pengokohan serta pengembangan institusi dan jaringan ekonomi kader. Sedangkan pelayanan adalah pemberdayaan masyarakat lapisan bawah dalam aspek moral, sosial dan ekonomi, dibarengi dengan pengokohan eksistensi dan peran *wajihah* yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat.
- c. Penokohan dan perluasan, yang dimaksud penokohan adalah pemunculan tokoh-tokoh skala nasional dan daerah di berbagai bidang, penguatan posisi ketokohan kader sebagai *opinion leader* di media dan masyarakat serta penguatan citra positif dan profesionalitas gerakan dakwah dengan berbagai sumber dayanya di tengah masyarakat.
- d. Pemenangan *Intikhab 'am* adalah aktivitas selanjutnya yang dilakukan melalui pendayagunaan kader, struktur, *wajihah* dan jaringan, penggalangan dana, serta konsolidasi hasil-hasil *intikhab 'am*.
- e. Evaluasi, artinya semua aktivitas diatas dievaluasi sehingga memberikan hasil-hasil yang baik di masa depan.²⁵

Dakwah *siyasah* sebagai gerakan dakwah yang memperhatikan masalah politik, juga gerakan dakwah yang menjadikan momen *intikhab 'am* sebagai lahan dan proses ekspansi besar-besaran pengaruh dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Dalam ekspansi ini, semua sumber daya dakwah struktural, kader, finansial, strategi, dan lainnya didayagunakan bagi upaya pemenangan dakwah di pentas politik.

Dakwah *siyasah* biasa dikenal dengan istilah dakwah struktural, selain itu terdapat pula dakwah kultural. Kedua ragam dakwah tersebut bisa dikatakan sebagai strategi dakwah.

3. Dakwah Kultural dan Struktural

a. Dakwah kultural

Dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”²⁶

²⁵Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah, *Manhaj Tarbiyah 1433*, jilid 3, h.20-22.

²⁶Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM), *Dakwah Kultural Muhammadiyah*, (Cet.II; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), h. 26.

Dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural. Islam kultural adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrin yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara.²⁷

Dakwah kultural mencoba memahami potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya berarti memahami ide-ide, adat-istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, simbol, dan hal-hal yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian dakwah kultural menekankan pada dinamisasi dakwah, selain pada purifikasi. Dinamisasi berarti mencoba untuk mengapresiasi (menghargai) potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya dalam arti luas, sekaligus melakukan usaha-usaha agar budaya tersebut membawa pada kemajuan dan pencerahan hidup manusia. Sedangkan purifikasi mencoba untuk menghindari pelestarian budaya yang nyata-nyata dari segi ajaran Islam bersifat *syirik*, *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*. Karena itu, dakwah kultural bukan berarti melestarikan atau membenarkan hal-hal yang bersifat *syirik*, *bid'ah*, *takhayul*, dan *khurafat*, tetapi cara memahami dan menyikapinya dengan menggunakan kaca mata atau pendekatan dakwah.²⁸

Dakwah kultural hadir untuk mengukuhkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu pola budaya tertentu dengan cara memisahkannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Dakwah kultural tidak menganggap power politik sebagai satu-satunya alat perjuangan dakwah. Dakwah kultural menjelaskan, bahwa dakwah itu sejatinya adalah membawa masyarakat agar mengenal kebaikan universal, kebaikan yang diakui oleh semua manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu.²⁹

Dakwah kultural memiliki peran yang sangat penting dalam kelanjutan misi Islam di bumi ini. Suatu peran yang tak diwarisi Islam Politik atau struktural yang hanya mengejar kekuasaan yang instan. Oleh karena itu, dakwah kultural harus tetap ada hingga akhir zaman. Menurut Prof. Dr. Said Aqil Siradji, jika dilihat secara historis dakwah kultural sudah ada sejak zaman Muawiyah yang dipelopori oleh Hasan Bashri (w. 110 H) yaitu dengan mendirikan forum kajian yang nantinya melahirkan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, hingga kemudian diteruskan oleh para Walisongo, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad dahlan dan lain sebagainya.³⁰

Dalam permainannya yang dimainkan oleh cendekiawan Muslim, dakwah kultural mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi ke atas dan fungsi kebawah. Dalam fungsinya ke lapisan atas antara lain adalah tindakan dakwah yang mengartikulasikan aspirasi rakyat (umat muslim) terhadap kekuasaan. Fungsi ini untuk mengekspresikan aspirasi rakyat yang tidak mampu mereka ekspresikan sendiri dan karena ketidakmampuan parlementer untuk mengartikulasi aspirasi rakyat. Fungsi ini berbeda dengan pola dakwah struktural karena pada fungsi ini lebih menekankan pada tersalurkanannya aspirasi masyarakat bawah pada kalangan penentu kebijakan.³¹

²⁷Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Mei 2003), h. 34.

²⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM), *Dakwah Kultural Muhammadiyah*, h. 26-27.

²⁹Ilyas Ismail, *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 249.

³⁰Said Aqiel Siradji, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, Cet. 1, 1999), h. 35.

³¹ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 166.

Sedangkan fungsi dakwah kultural yang bersifat ke bawah adalah penyelenggaraan dakwah dalam bentuk penerjemahan ide-ide intelektual tingkat atas bagi umat muslim serta rakyat umumnya untuk membawakan transformasi sosial. Hal yang paling utama dalam fungsi ini adalah penerjemahan sumber-sumber agama (Al-Quran dan Sunnah) sebagai *way of life*. Fungsi dakwah kultural ini bernilai praktis dan mengambil bentuk utama dakwah *bi al-hal*.³²

Dakwah kultural sangat mengedepankan penanaman nilai, kesadaran, kepehaman ideologi dari sasaran dakwah. Dakwah kultural melibatkan kajian antara disiplin ilmu dalam rangka meningkatkan serta memberdayakan masyarakat. Aktivitas dakwah kultural meliputi seluruh aspek kehidupan, baik yang menyangkut aspek sosial budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, alam sekitar dan lain sebagainya.

Pendapat yang sama diungkapkan bahwa dakwah kultural yaitu dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya masyarakat setempat, dengan tujuan agar pesan dakwahnya bisa diterima dengan “tanpa terasa” oleh para *mad'u*. Tampak dalam hal ini bahwa pendekatan kultural sangat memerhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya, sehingga pelaksanaan dakwah menjadi sangat luwes. Guna menciptakan kultur baru bernuansa islami, dakwah kultural memanfaatkan adat, tradisi, seni dan budaya lokal.³³

Ciri- ciri dakwah kultural adalah: *dinamis, kreatif dan inovatif*.³⁴ Keberhasilan dakwah kultural ditandai dengan teraktualisasikan dan terfungsikannya nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, kelompok dan masyarakat.

b. Dakwah struktural

Dakwah Struktural adalah gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan. Aktivis dakwah ini memanfaatkan struktur sosial, politik maupun ekonomi untuk mendakwahkan ajaran Islam. Jadi, negara dipandang sebagai alat yang paling strategis untuk berdakwah. Di dalam dakwah struktural ini telah menyatakan bahwa dakwah yang sesungguhnya adalah aktivisme Islam yang berusaha mewujudkan negara yang berasaskan Islam.³⁵

Pandangan di atas sejalan dengan yang diungkapkan Asep Muhyiddin, dkk menjelaskan bahwa dakwah struktural dilakukan berdasarkan “kekuasaan” atau “kekuatan” dari mereka yang merasa dirinya “atas” baik dari sisi posisi maupun ilmu yang dimiliki kepada para *mad'unya*. Alhasil, dakwah struktural bersifat *top-down*. Apa yang dikatakan para dai senantiasa lebih baik daripada yang dipahami oleh *mad'u*. Bukan hanya bersifat satu arah, dakwah struktural juga meniscayakan pentingnya ketaatan yang total dari *mad'u* kepada dai. Ada pembatasan kepada para *mad'u* untuk menyatakan sikap yang berbeda atas kehendak para dai.³⁶

Perkembangan dakwah struktural ini sudah dapat ditemukan pada gerakan politik umat Islam pada masa klasik. Sebagai contoh adalah penggulingan Dinasti Umayyah dari kursi kekhalifahan yang dilakukan oleh eksponen Dinasti Abbasiyah yang mana itu dianggap sebagai gerakan dakwah. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Syi'ah

³² Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, h. 166.

³³ Asep Muhyiddin, dkk, *Kajian Dakwah Multiperspektif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 119.

³⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM), *Dakwah Kultural Muhammadiyah*, h. 29.

³⁵ Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, h. 27.

³⁶ Asep Muhyiddin, dkk, *Kajian Dakwah Multiperspektif*, h. 119.

Islamailiyyah. Gerakan politiknya yang diawali dengan pengiriman para aktivis politik ke Afrika Utara sebagai langkah strategis bagi persiapan pembentukan dinasti Fatimiyyah yang akan didirikan di sana. Bahkan, istilah dakwah juga telah dipakai untuk menyebut wilayah politik Dinasti Fatimiyyah.³⁷

Dakwah kultural merupakan model dakwah yang menjadikan struktur pemerintahan dan kekuasaan sebagai media dakwah.³⁸ Semua orang Islam mendukung pelaksanaan syariat Islam, namun ketika berbicara tentang penegakkan syariat Islam umat Islam terbagi ke dalam dua aliran besar, salah satunya yaitu aliran formalistis. Aliran formalistis berpandangan bahwa penegakkan syariat Islam tidak hanya sampai pada penerapan nilai-nilai Islam saja tetapi secara formal Islam dan syari'at Islam harus dijadikan sebagai hukum positif dan melembaga dalam institusi Negara.³⁹

Dakwah kultural dan dakwah struktural masing-masing berbeda. Masing-masing mempunyai strategi sendiri-sendiri dalam penguatannya. Jika kedua dakwah ini bergabung maka dakwah akan melengkapi satu sama lain. Namun dalam penerapannya, kedua dakwah ini pun tidak terlepas dari berbagai masalah. Sebagai contoh adalah permasalahan ekonomi. Ketidakmerataan ekonomi membuat kedua dakwah ini mengalami hambatan. Selain dari permasalahan ekonomi tersebut mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan agama di Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita cermati dari masalah-masalah tersebut yaitu: pertama, adanya "efektivitas" dakwah suatu agama yang ternyata tumbuh lebih cepat dengan didukung oleh penerapan metode dan sarana yang memadai. Kedua, di lain pihak khususnya dalam umat Islam, terjadi situasi "ketinggalan" seperti ditunjukkan oleh penurunan relatif dari pemeluknya yang disebabkan oleh kurangnya pengkajian penerapan metode dakwah "tepat guna dan kreatif" serta kurangnya sarana yang memadai.⁴⁰

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mengamati fenomena atau kenyataan tentang dakwah *siyasah* sebagai strategi dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sulawesi Tenggara. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Lokasi penelitian bertempat di Kota Kendari Sulawesi Tenggara yaitu strategi dakwah PKS di kota Kendari, Kab.Muna dan Anggota legislatif. Pemilihan lokasi ini sebagai objek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa gerakan dakwah PKS menggunakan dakwah *siyasah* dengan sistem kaderisasi yang unik dan menarik serta memiliki keberagaman anggota atau kader dari segi usia, latar belakang pendidikan dan lain-lain juga didukung dengan masyarakat Sulawesi Tenggara yang masih mayoritas muslim. Penelitian ini penulis laksanakan sejak tanggal 8 juni sampai 27 Agustus 2015.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dakwah, komunikasi dan pendekatan sosiologis. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus inti Partai Keadilan Sejahtera di Kota Kendari

³⁷M. Canard, "Da'wa", dalam B. Lewis, CH Pellat and J Schacht, *The Ensiklopedea of Islam*, (Cet. II; Leiden: E.J. Brill, 1986), h. 168-169.

³⁸Usman Jasad, *Dakwah dan Komunikasi Transformatif (Mencari Titik Temu Dakwah dan Realita Sosial Ummat)*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 161.

³⁹Usman Jasad, *Dakwah dan Komunikasi Transformatif*, h. 159.

⁴⁰Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, h. 167.

yakni ketua umum dan sekretaris umum, dan ketua bidang dakwah DPW Sulawesi Tenggara, sekretaris DPD PKS Kab.Muna dan anggota legislatif, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta dokumentasi mengenai pelatihan yang pernah diikuti oleh para kader. Sedangkan sumber data sekunder dalam bentuk dokumen yang telah ada yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku-buku yang menjelaskan tentang PKS, data dan dokumentasi penting yang menyangkut profil PKS, materi-materi dakwah dan data kader PKS yang menjadi anggota legislatif serta data base kader.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen masing-masing sesuai metodenya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari hasil observasi dan wawancara yang penulis peroleh dari informan pada kader atau pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di wilayah Sulawesi Tenggara, ada beberapa hal yang penulis identifikasikan untuk kemudian dideskripsikan bentuk dakwah *siyasaah* sebagai strategi dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sulawesi Tenggara. Berbagai persoalan yang dilihat oleh PKS baik di dalam maupun luar negeri terutama yang terjadi dikalangan umat muslim. Sebagai suatu gerakan sosial dan dakwah sangat peka terhadap kondisi umat Islam Indonesia pada khususnya, dan dominasi Barat terhadap tata kelola dunia pada umumnya. Salah satu yang dilirik oleh PKS bahwa paham liberalisme Barat adalah sumber permasalahan yang menyebabkan terjadinya dekadensi moral, ketidakadilan ekonomi, dan degradasi politik. Sekularisme menjadi tantangan terbesar umat Islam sedunia dalam mempraktekan nilai-nilai Islam yang *kaffah*. Ketua Bidang Dakwah DPW PKS Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa “paham sekularisme bertentangan dengan PKS dan tidak sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat di Indonesia.”⁴¹

Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan yang akut dikalangan umat muslim tersebut PKS menawarkan gagasan Islam sebagai solusi. Dalam visi dan misi, PKS menyatakan diri sebagai partai yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan bangsa dan Negara. Meskipun hal seperti ini dilakukan oleh gerakan Islam dimana-mana, namun terdapat perbedaan penting antara PKS dengan gerakan Islam lainnya, terutama dalam taktik dan strategi. Islam adalah satu, tetapi ekspresi dari gerakan Islam itu sangat beragam. Jama'ah Tabligh misalnya, fokus pada “dakwah murni”. Bermuara dalam hal transformasi kepercayaan individu terhadap nilai-nilai Islam, tapi mengabaikan keterlibatan aktif dalam politik. Sebaliknya, Hizbut Tahrir justru sangat politis dan mengkampanyekan Islam sebagai satu-satunya solusi dengan menolak secara keras sistem atau cara pandang buatan manusia, seperti demokrasi, sekularisme dan kapitalisme.⁴²

Sementara, PKS memandang Islam sebagai solusi bagi transformasi individu dan Islamisasi Negara melalui partisipasi politik formal. Partai ini menawarkan paket solusi melalui dua pola strategi. Adapun dakwah *siyasaah* sebagai strategi dakwah tersebut, yaitu berupa pola struktural dan pola kultural.

⁴¹La Ode Muh. Dasnah (42 tahun), Ketua Bidang Dakwah dan Staf Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, 25 Juni 2015.

⁴²La Ode Muh. Dasnah (42 tahun), Ketua Bidang Dakwah dan Staf Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, 25 Juni 2015.

1. Pola Struktural

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki perjalanan yang cukup panjang sebelum akhirnya bermetamorfosa sebagai partai politik seperti saat ini. Hal tersebut tercermin dari tahapan-tahapan dakwah yang telah berhasil maupun yang akan dicapai. Melihat realitas yang terjadi bahwa PKS memiliki manajemen dakwah yang baik. Misalnya memiliki program kerja jangka pendek, menengah dan panjang serta selalu menetapkan target yang hendak dicapai dalam setiap perencanaan-perencanaan yang dilakukan. Begitupun halnya dengan pelaksanaan dakwah PKS mempunyai *manhaj* yang jelas, melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah sesuai dengan *manhaj*, memiliki struktur internal yang kuat, menggunakan berbagai sarana dalam melaksanakan kegiatan, memiliki program turunan untuk pengembangan partai. Para kader PKS juga senantiasa mengadakan evaluasi dalam setiap aktivitas mereka. Artinya mengadakan pertemuan atau rapat setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan internal partai maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat umum.⁴³ Dengan begitu mereka akan mengetahui sukses atau tidaknya kegiatan yang telah dilakukan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik juga merupakan partai yang membawa misi Islam. Oleh karena itu, secara struktural PKS di Sulawesi Tenggara tidak ketinggalan untuk senantiasa mengusahakan penyebaran kader-kadernya di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang tentu saja melalui mekanisme partai politik dan profesionalitas kader. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS:

Dalam hal itu, dengan memobilisasi sebanyak mungkin orang, terlepas dari suku, ras, dan jenis kelamin untuk rela menjadi anggota, simpatisan, dan sukarelawan PKS. Tentu diharapkan bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang diorganisir oleh partai.⁴⁴

Mekanisme rekrutmen semacam ini jelas merupakan karakter dasar partai politik seperti PKS yang mementingkan kuantitas dukungan dari warga sebagai tiket untuk memenangkan pemilu. Titik tekan pola ini adalah dari segi jumlah. Walaupun tidak bersedia menjadi kader aktif, setidaknya orang-orang bisa simpatik terhadap agenda dan perjuangan PKS. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Bidang Dakwah DPW PKS tentang dakwah struktural yang biasa dilakukan partai.

Dakwah secara institusional merupakan salah satu cara dakwah struktural yang dilaksanakan oleh PKS, dalam hal ini bisa berbagai bentuk yang melibatkan struktur formal PKS dengan bekerjasama dengan institusi-institusi keagamaan seperti masjid maupun institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dakwah *siyasah* yang dilaksanakan oleh PKS di Sulawesi Tenggara sebagai strategi dakwahnya menggunakan pola struktural. Hal tersebut terlihat adanya beberapa kader partai yang menjadi anggota legislatif di tingkat provinsi maupun kota yang senantiasa berusaha memperjuangkan regulasi atau kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam ataupun hal-hal yang perlu diperjuangkan terkait dengan kemashlahatan umat. Beberapa kebijakan yang telah berhasil diperjuangkan oleh anggota legislatif dari kader PKS di Sulawesi Tenggara

⁴³Arsip Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Tenggara, *Dokumentasi dan Observasi*, Kendari Juni-Juli 2015.

⁴⁴Muhammad Poli (40 tahun), Ketua DPW PKS dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, 29 Juni 2015.

⁴⁵La Ode Muh.Dasnah (42 tahun), Ketua Bidang Dakwah DPW PKS dan Staf Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, Kendari 25 Juni 2015.

berdasarkan hasil wawancara dengan seorang anggota legislatif dan staf ahli DPRD yaitu:

- a. Sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang mengelola kegiatan keumatan selalu mendapatkan perhatian anggaran di setiap pembahasan APBD.
- b. Pelatihan para mubaligh/mubalighah di semua daerah di Sulawesi Tenggara.
- c. Program-program pemberdayaan kelompok usaha masyarakat di semua bidang untuk menunjang kebutuhan perekonomian mereka.⁴⁶
- d. Mengadvokasi bantuan untuk kalangan ekonomi bawah dan menengah seperti para nelayan dan wiraswasta (tukang kayu, dan semacamnya).
- e. Mengadvokasi anggaran untuk perbaikan jalan.
- f. Mengadvokasi anggaran untuk pendirian dan perbaikan masjid.
- g. Memperjuangkan nasib para honorer.
- h. Memperjuangkan gaji para atlet.
- i. Menyelesaikan sengketa tanah antara pemerintah provinsi dan masyarakat.
- j. Memperjuangkan penghapusan pajak minuman keras.⁴⁷

Secara sederhana pola struktural yaitu pola dakwah yang mengharuskan seseorang terikat dalam sebuah struktur. Adapun cara lain yang dilakukan oleh PKS dalam merealisasikan pola struktural ini yakni partai akan mewajibkan para kadernya terlibat aktif dalam serangkaian pelatihan intensif. Pelatihan ini dikemas secara berjenjang atau hirarki (*marhalah*), yang mencakup proses pembelajaran (*ta'lim*), mangasah kemampuan organisasi (*tandzim*), pengembangan karakter dan internalisasi ajaran Islam (*taqwin*), dan evaluasi (*taqwim*).⁴⁸ Singkat kata proses kaderisasi di PKS yang menggunakan sistem hirarki tersebut, dapat dibagi dalam enam tingkatan pelatihan yang berakhir pada tingkat *takhassus*, yang memiliki keahlian dakwah secara paripurna.

Berdasarkan gambaran di atas dapat terlihat bahwa PKS memiliki standar rekrutmen yang ketat dan pola rekrutmen tersebut bertujuan untuk mendaftar kader-kader potensial melalui mekanisme rekrutmen yang selektif.

Sama halnya yang dilakukan oleh para anggota legislatif PKS di Sulawesi Tenggara, meskipun mereka sudah berada di pemerintahan akan tetapi mereka senantiasa mengikuti kegiatan kepartaian yang diselenggarakan oleh struktur PKS sebagaimana telah dijelaskan oleh salah seorang responden yang merupakan anggota dewan yaitu:

- a. Selalu mengikuti kajian atau *ta'lim* rutin partai yang diselenggarakan oleh kaderisasi DPD PKS Sulawesi Tenggara.
- b. Aktif berpartisipasi pada setiap kegiatan struktur yang dilaksanakan, seperti kegiatan bakti sosial dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya.⁴⁹

Mengenai pola struktural ini, beberapa tokoh PKS mengakui bahwa tujuan utama PKS adalah lahirnya “Negara yang berdasarkan pada hukum Islam.”⁵⁰ Untuk itu, diperlukan strategi struktural yang sistematis dalam merealisasikan formalisasi hukum

⁴⁶La Pili (37 tahun), Sekretaris MPW PKS dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, Raha 25 Agustus 2015.

⁴⁷La Ode Muh.Dasnah (42 tahun), Ketua Bidang Dakwah DPW PKS dan Staf Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, Kendari 20 Desember 2015.

⁴⁸Arsip Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Tenggara, *Dokumentasi*, Kendari, Juni-Juli 2015.

⁴⁹La Pili (37 tahun), Sekretaris MPW PKS dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, Raha, 25 Agustus 2015.

⁵⁰Beberapa Responden, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah Kab. Muna, *Wawancara*, Kendari dan Raha, Juni-Agustus 2015.

atau nilai-nilai Islam melalui instrumen Negara. Sebagaimana dinyatakan dalam paradigma PKS, pola struktural ini mengambil bentuk partisipasi politik formal yang ditujukan untuk merestrukturisasi kebijakan dan institusi Negara dalam rangka menerapkan hukum Islam (syariah) di masyarakat. Argumen utamanya adalah bahwa Islam harus memainkan peran kunci di dalam Negara, dan syariah adalah bagian inheren dalam masyarakat Indonesia, yang seharusnya direpresentasikan secara formal dalam hukum nasional.⁵¹

Namun demikian, bagi PKS implementasi nilai-nilai dan syariah Islam dalam Negara adalah tahap akhir proses Islamisasi yang berkelanjutan, mulai dari individu, keluarga, tetangga dan masyarakat.⁵² Karena yang utama bukanlah Negara yang menerapkan sistem syariah, akan tetapi masyarakat yang menerapkan syariah Islam.

2. Pola Kultural

Pola dakwah kultural merupakan dakwah yang dilakukan dengan pembinaan sekaligus pemberdayaan terhadap masyarakat dengan memanfaatkan adat, tradisi, dan semacamnya. Dimana tujuan utama pola kultural PKS yakni meniscayakan kader-kader PKS melakukan proses internalisasi nilai-nilai dakwah dan penetrasi dalam kehidupannya bermasyarakat melalui penyebaran kader dakwah ke berbagai lapisan masyarakat agar mereka yang berbaur dan hidup berdampingan menerima *manhaj* Islam dan produk kebijakan Islami. Dalam pola kultural ini biasanya lebih banyak yang berperan yaitu para kader yang berada pada Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa).⁵³

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki cara yang unik dalam melaksanakan pola kultural ini diantaranya dengan dakwah *fardhiyyah* yakni bentuk pendekatan orang per orang meliputi komunikasi antar personal secara langsung. Cara ini terutama diaplikasikan kepada tokoh-tokoh penting di masyarakat. Strategi ini dimulai dengan mengajak calon-calon kader potensial dilingkungan terdekat kader seperti keluarga, teman, kolega kerja, dan tetangga. Dengan kata lain cara ini dibangun atas dasar relasi sosial yang telah ada sambil pada saat yang sama menumbuhkan semacam solidaritas baru berdasarkan kepercayaan yang sama, serta komitmen dan loyalitas yang kuat. Calon-calon kader tersebut akan diajak untuk berpartisipasi dalam serangkaian forum keagamaan dan pelatihan yang diorganisir oleh PKS.⁵⁴

Forum-forum tersebut seperti *usrah* (keluarga), atau *halaqah* (kelompok studi terbatas) atau *liqo* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (kemping), *daurah* (pelatihan intelektual atau workshop islami), *nadwah* (seminar), dan seterusnya. Harapannya adalah setiap kader baru akan saling mengenal (*ta'aruf*), memahami (*tafahum*), dan mendukung (*tafaul*).⁵⁵

⁵¹Muhammad Poli ((40 tahun), Ketua DPW PKS dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, 29 Juni 2015.

⁵²Milwan, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kab. Muna Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, 30 Agustus 2015.

⁵³La Dahira (46 tahun), Ketua Bidang Dakwah Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kab. Muna Sulawesi Tenggara, *Observasi dan Wawancara*, 2 Agustus 2015.

⁵⁴Milwan, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kab. Muna Sulawesi Tenggara, *Observasi dan Wawancara*, 30 Agustus 2015.

⁵⁵Arsip Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Tenggara, *Dokumentasi dan Observasi*, Kendari, Juni-Juli 2015.

Kegiatan-kegiatan terorganisir secara sistematis ini dilakukan secara rutin, dengan harapan bahwa peserta-peserta baru bisa memiliki nilai dan pemahaman yang sama.

Namun, cara ini banyak terealisasi dalam lingkungan internal partai. PKS merupakan sebuah kelompok-kelompok kecil kajian keagamaan yang lebih dikenal dengan istilah tarbiyah/*liqo*. Secara garis besar, *liqo* dibedakan menjadi dua. *Liqo* jenis pertama dibina oleh *murabbi*. Pesertanya adalah kader *tamhidi* (kader pemula) dan *muayyid* (kader muda). Kader *muayyid* yang berprestasi dan memiliki loyalitas tinggi bisa diangkat menjadi seorang *murabbi*. Kader *muayyid* yang lulus dengan baik akan mengikuti kegiatan *muayyasaah* atau kajian matrikulasi. Jika lulus, maka kader tersebut akan diminta melakukan sumpah setia kader inti partai. Setelah *dibai'at* kader ini akan mendapatkan *liqo* khusus yang disebut *liqo usari* yang wajib diikuti kader *muntasib* (kader madya), *muntazhim* (kader dewasa) dan ahli. Pembina *liqo usari* disebut *naqib*.⁵⁶

Sedangkan dalam lingkungan eksternal partai dimana para kader hidup bermasyarakat tetap menggunakan pendekatan antar personal atau dakwah *fardhiyah*. Hal ini dilakukan melalui adat-istiadat atau budaya yang ada dalam sebuah masyarakat. sebagaimana kita ketahui bahwa adat-istiadat merupakan kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, terdapat beberapa adat-istiadat yang prosesnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sama halnya dengan daerah-daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Para kader PKS juga meyakini bahwa adat-istiadat tidak bisa dihilangkan begitu saja akan tetapi bisa dijadikan sebagai salah satu sarana dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Apalagi bagi mereka para kader yang sudah diangkat menjadi tokoh masyarakat, baik itu tokoh agama maupun tokoh adat.

Dakwah melalui adat-istiadat atau budaya ini dapat dikatakan sebagai dakwah kultural. Contoh dakwah kultural yang terus-menerus dilaksanakan dan diperjuangkan oleh kader-kader PKS yaitu:

- a. Ziarah kubur yang dilaksanakan satu atau dua hari sebelum hari raya 'id merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat Sulawesi Tenggara. Kebiasaan ini dilakukan pergi dikuburan dengan membakar sabut kelapa dan kemenyan dengan pemahaman bahwa asap dari sabut kelapa dan kemenyan tersebut terbang bersamaan dengan dosa-dosa mayat yang berada dalam kubur. Kader PKS mengarahkan serta menggantikan kebiasaan tersebut dengan membersihkan kuburan dan mengirimkan doa. Tentunya dimulai dengan proses, salah satunya keteladanan. Sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang meninggalkan kebiasaan tersebut.⁵⁷
- b. Pingitan merupakan adat yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah seperti Wakatobi, Buton, Muna dan lainnya. Pingitan secara sederhana para gadis remaja dikurung atau ditempatkan dalam sebuah kamar sampai cahayapun tidak bisa masuk dan peserta pingitan tidak diperbolehkan keluar selama beberapa hari, biasanya tiga atau empat hari. Sebelumnya dalam kamar tersebut kebanyakan para gadis tersebut hanya dibersihkan secara fisik. Namun, perlahan-lahan prosesnya berubah bukan saja dibersihkan secara fisik tetapi di dalamnya ada proses tarbiyah yakni para peserta tarbiyah diberikan pemahaman tentang kewanitaan, seperti mandi wajib, bagaimana peran perempuan, dan lainnya.

⁵⁶Arsip Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Tenggara, *Dokumentasi dan Observasi*, Kendari, Juni-Juli 2015.

⁵⁷Milwan, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kab. Muna Sulawesi Tenggara, *Observasi dan Wawancara*, 30 Agustus 2015.

- c. Menjelang hari raya 'id atau tepat hari raya terdapat kebiasaan baca-baca doa, yaitu menyiapkan satu talang makanan mewah kemudian memanggil seorang imam untuk membacakan doa agar mereka diberikan rezki yang melimpah di masa-masa mendatang. Olehnya itu, mereka memilih imam sesuai dengan keberlimpahan rezki mereka dari tahun ke tahun. Hal ini diarahkan dengan memberikan ceramah singkat sebelum memulai do'a serta tidak lupa memberi pemahaman bahwa berdoa bisa kapan saja, dimana saja dan bisa dilakukan sendiri dan tanpa hidangan serta tidak perlu harus ada momen. Kebiasaan ini sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh sebagian masyarakat.⁵⁸
- d. Menjelang ramadhan biasanya masyarakat hanya disibukkan dengan membuat makanan. Beberapa tahun terakhir kebiasaan ini diganti dengan pawai akbar ramadhan dengan melibatkan sekolah-sekolah, serta kerjasama dengan pemerintah setempat. Hal ini bertujuan sebagai salah satu syiar Islam. Begitupun dengan perayaan maulid nabi, *nuzul al-Quran* dan tahun baru hijriyah. Dahulu momen-momen ini terlewatkan begitu saja, akan tetapi saat ini dijadikan sarana syiar Islam dengan menghadirkan penceramah dan melibatkan semua elemen masyarakat.
- e. Setelah meninggal terdapat kebiasaan pelepasan tiga hari, tujuh hari, 40 hari dan 100 hari, yang mana dilaksanakan secara besar-besaran hampir menyamai resepsi pernikahan dan biaya yang dihabiskan pun jutaan rupiah tanpa diketahui jelas apa tujuan dari pelepasan tersebut. Sekarang beberapa keluarga ataupun masyarakat sudah meninggalkan kebiasaan tersebut digantikan hanya dengan memanggil seorang ustad untuk memberikan ceramah tentang kematian atau yang ada kaitannya dan juga dengan makanan seadanya tanpa memberatkan keluarga yang sementara berduka.⁵⁹

Sedangkan contoh kegiatan para anggota legislatif PKS lakukan secara kultural di Sulawesi Tenggara seperti yang telah diungkapkan oleh sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) antara lain:

- a. Aktif melibatkan diri di setiap kegiatan sosial masyarakat di lingkungannya.
- b. Selalu mengadakan silaturahmi untuk mendengarkan saran atau masukan (aspirasi) dari masyarakat di dapilnya masing-masing.⁶⁰

Mengenai pola kultural ini dilakukan kepada individu dan kelompok masyarakat melalui media dakwah dan pranata budaya untuk menguatkan basis kultural dan intelektualitas umat. Argumen dasarnya adalah bahwa proses imperialisme kultural melalui sekularisme telah merusak cara pandang umat Islam, sehingga perlu islamisasi kultural agar kembali pada jalan sesuai dengan yang ditetapkan sumber-sumber rujukan Islam (al-Quran dan al-Hadis). Islam harus dipahami secara *kaffah*, total, komprehensif dan mencakup keseluruhan jalan hidup tanpa pemisahan antara agama dan Negara. Dengan kata lain, PKS memandang Islam sebagai peraturan dan petunjuk lengkap yang memberikan panduan bagi kebutuhan spiritual dan dunia (*syamil*). Konsepsi tersebut digabungkan dengan keyakinan bahwa Islam itu universal. Universalitas Islam inilah yang diyakini kader-kader PKS sebagai dasar moral spiritual bagi pembangunan

⁵⁸Milwan, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kab. Muna Sulawesi Tenggara, *Observasi dan Wawancara*, 30 Agustus 2015.

⁵⁹Milwan, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kab. Muna Sulawesi Tenggara, *Observasi dan Wawancara*, 30 Agustus 2015.

⁶⁰La Pili (37 tahun), Sekretaris MPW PKS dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, Raha, 25 Agustus 2015.

Indonesia. Pola kultural ini dilakukan dengan cara *gradual*, dan bertahap, serta membutuhkan proses yang panjang.⁶¹

Adapun aksi yang nyata dakwah kultural yang telah PKS laksanakan yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis keislaman seperti Sekolah Islam Terpadu (SIT), Lembaga Sosial seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang bergerak dibidang sosial juga kesehatan yang banyak diperuntukkan pada masyarakat yang kurang mampu.

V. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dakwah *siyasah* sebagai strategi dakwah yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sulawesi Tenggara yakni dengan memadukan antara pola struktural dan kultural. Secara struktural PKS memperjuangkan regulasi atau kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam sedangkan secara kultural PKS melakukan pemberdayaan umat Islam melalui kelompok-kelompok tarbiyah yang intensif dan persuasif.

⁶¹Muhammad Poli (40 tahun), Ketua DPW PKS dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Observasi dan Wawancara*, 29 Juni 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Prima Duta, 1983.
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- An-Nabani, Taqiyudin. *An-Nizam al-Islam (Peraturan Hidup Dalam Islam)*, Jakarta: HTI Press, 2007.
- Aziz, Ali. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Banna, Hasan al-, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al Banna*, Cet.I; Jakarta: Al-I'tishom, 2008
- Banna, Hasan al-, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*, Surakarta: Era Intermedia, 2011
- Djazuli, A., *Fiqh Siyash: Implementasi Kemashlahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Ed. II, Cet.I; Bogor; Kencana, 2003.
- Effendi, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, Cet.XII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.
- Gibb, H.R. dalam M. Natsir. *Capita Selecta*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Hawa, Sa'id. *Al-Islam 2*; Penerjemah, Fakhruddin Nur Syam, Muhil Dhofir, Jakarta: Al-I'tishom, 2002.
- Ismail, Ilyas. *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jasad, Usman. *Dakwah dan Komunikasi Transformatif (Mencari Titik Temu Dakwah dan Realita Sosial Ummat)*, Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- M. Canard. *Da'wa*, dalam B. Lewis, CH Pellat and JS Schacht, *The Ensiklopedie of Islam*, Cet. II; Leiden: E.J. Brill, 1986.
- Matta, Anis. *Dari Gerakan ke Negara*, Bandung: Fitrah Rabbani, 2010.
- Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*, Cet.I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhyiddin, Asep, dkk, *Kajian Dakwah Multiperspektif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya, Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM), *Dakwah Kultural Muhammadiyah*, Cet.II; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Sa'id Hawa, *Membina Angkatan Mujahid, Studi Analitis atas Konsep Dakwah Hasan Al Banna dalam Risalah Ta'alim*, Cet.VII; Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010

Siradji, Said Aqiel. *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

Sulthon, Muhammad. *Desain Ilmu Dakwah Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Takariawan, Cahyadi. *Menyongsong Mihwar Daulah*, Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2009.

Yakan, Fathi. *Komitmen Muslim Sejati*, Cet.IX; Solo: Era Intermedia, 2010.

Sumber Wawancara

La Ode Muh. Dasnah (42 tahun), Ketua Bidang Dakwah dan Staf Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, 25 Juni 2015.

Arsip Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Tenggara, *Dokumentasi dan Observasi*, Kendari Juni-Juli 2015.

Muhammad Poli (40 tahun), Ketua DPW PKS dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, 29 Juni 2015.

La Pili (37 tahun), Sekretaris MPW PKS dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, Raha 25 Agustus 2015.

¹Beberapa Responden, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah Kab. Muna, *Wawancara*, Kendari dan Raha, Juni-Agustus 2015.

Milwan, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kab. Muna Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, 30 Agustus 2015.

La Dahira (46 tahun), Ketua Bidang Dakwah Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kab. Muna Sulawesi Tenggara, *Observasi dan Wawancara*, 2 Agustus 2015.